

## Raperda Perubahan APBD Disampaikan kepada Gubernur untuk Dievaluasi Sesuai Amanat Undang-Undang

Anton Atong Sugandhi - [PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM](http://PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM)

Sep 26, 2023 - 20:55



PANGANDARAN JAWA BARAT - Persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD melalui Rapat Paripurna ini, akan disampaikan kepada gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dalam pidato sambutannya dalam rangka paripurna pembicaraan TK.II penandatanganan keputusan DPRD dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Pangandaran  
tahun anggaran 2023.  
bertempat di  
gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Selasa (26/09/2023).

Disampaikannya bahwa,  
dengan persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 hari ini, menjadi  
pertanda bahwa koordinasi dan kerjasama yang  
baik serta kepatuhan dalam menyelesaikan semua tahapan pembahasan  
RAPBDP 2023 ditujukan  
sebesar-besarnya  
untuk kepentingan  
kesejahteraan  
masyarakat Kabupaten Pangandara.

Penyusunan Raperda perubahan APBD ini telah disesuaikan dengan arah  
kebijakan pokok pembangunan yang merupakan prioritas dan  
tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan  
Perubahan  
Prioritas Plafon Anggaran  
Sementara tahun anggaran 2023.

Berbagai catatan, pertanyaan serta koreksi yang disampaikan DPRD tentang  
keterkaitan  
antara kesesuaian indikator aturan belanja serta kebutuhan pencapaian kinerja,  
baik pada  
penyampaian pandangan umum maupun melalui  
rapat kerja komisi dengan SKPD dan antara Badan  
Anggaran DPRD dengan TAPD, telah dilakukan  
pembahasan  
dan ditindaklanjuti  
secara transparan dalam suasana saling memahami tugas  
dan fungsi kedua lembaga," katanya.

Lanjut Jeje, persetujuan bersama Raperda perubahan APBD melalui Rapat  
Paripurna ini, akan disampaikan  
kepada gubernur Jawa Barat untuk dilakukan  
evaluasi sesuai dengan amanat peraturan  
perundang-undangan.

Evaluasi tersebut  
bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan  
peraturan perundang-undangan yang meliputi  
aspek teknis, aspek material dan aspek legalitas," ucapnya.

Menurut Jeje, hasil evaluasi gubernur menjadi pedoman untuk penyempurnaan  
oleh Badan Anggaran DPRD  
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian dituangkan  
pada keputusan  
pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya,  
Raperda Perubahan APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Diharapkan  
seluruh OPD segera melakukan efektivitas  
pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan kualitas.

Anggaran yang disiapkan dalam Perubahan-APBD adalah anggaran maksimal. Oleh karenanya, efisiensi dalam pelaksanaan belanja tetap harus memperhatikan prioritas pembangunan dan kondisi keuangan daerah serta senantiasa memperhatikan kepatuhan dan kedisiplinan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Tambah Jeje, hadirin yang berbahagia,  
demikianlah yang dapat saya sampaikan, mari  
kita niatkan semua ini bagian dari ibadah kepada alloh swt dan pengabdian  
kepada masyarakat  
kabupaten pangandaran. seraya bermohon kepada  
alloh swt agar kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang kita  
rencanakan dengan  
sebaik-baiknya," ujarnya.

Parigi, 26 September 2023  
Bupati Pangandaran  
H. Jeje Wiradinata. (Anton AS)